

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 144 /KEP/G4/2022  
TENTANG  
TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA  
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan pemutakhiran;
  - b. bahwa pendataan keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun sebagai dasar mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, percepatan penurunan *stunting* dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pos Koordinasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

uf 27/2

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pos Koordinasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Tim Posko Pemutakhiran PK-22.
- KEDUA : Tim Posko Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Pusat
  - b. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Provinsi
  - c. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Kab/Kota
  - d. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Kecamatan

Wf 24/11/2021



- KETIGA : Tim Posko Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri dari:
- I. Tim Pengarah
    - a. Pengarah
    - b. Anggota
  - II. Tim Pelaksana
    - a. Penanggung Jawab
    - b. Ketua Pelaksana
    - c. Wakil Ketua
    - d. Sekretaris
    - e. Anggota
      - 1. Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
      - 2. Bidang Pengorganisasian Lapangan
      - 3. Bidang Sosialisasi, Promosi, Advokasi dan Kemitraan
      - 4. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
      - 5. Bidang Penguatan Teknologi Informasi
      - 6. Bidang Manajemen Data Terpadu
  - III. Tim Monitoring
- KEEMPAT : Susunan Tim Posko Pemutakhiran PK-22 dan nama-nama anggota tim pelaksana pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Posko Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf c, huruf d ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada tingkatan wilayah masing-masing dan susunan keanggotaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22
- KEENAM : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Posko Pemutakhiran PK-22 bersumber dari :
- a. APBN BKKBN Tahun Anggaran 2022;
  - b. APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
  - c. Sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wp 275



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
HASTO WARDOYO y/v,

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 144/KEP/G4/2022  
TENTANG TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN  
PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA  
TAHUN 2022 PUSAT

I	TIM PENGARAH	
	Pengarah	: Kepala BKKBN
Anggota	Tugas	: 1. Sekretaris Utama
		2. Inspektur Utama
		3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
		4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
		5. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
		6. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
		7. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan pada Sekretariat Wakil Presiden
		8. Deputi I Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		9. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri
		10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri
		: a. memberikan arahan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22;
		b. memberikan dukungan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22; dan
		c. memantau pelaksanaan Pemutakhiran PK-22.

uf 2 4/5

## II TIM PELAKSANA

Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
Ketua Pelaksana	: Direktur Pelaporan dan Statistik
Wakil Ketua	: Direktur Teknologi Informasi dan Data
Sekretaris	: Ristya Ira Murti, SE, MAPS (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
Tugas	: a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Pemutakhiran PK-22; b. mengkoordinasikan bidang-bidang pelaksana tugas dan melakukan pertemuan rutin <i>progress</i> pelaksanaan Pemutakhiran PK-22; c. memastikan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 berjalan sesuai jadwal; d. memantau pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 di seluruh tingkatan wilayah; dan e. melaporkan secara berkala kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab <i>progress</i> pelaksanaan Pemutakhiran PK-22

## ANGGOTA

### 1 Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Ketua	: Kepala Biro Perencanaan
Wakil Ketua	: Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
Sekretaris	: M. Arfan, ST, MPH (Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol pada Biro Umum dan Humas)
Anggota	: 1. Doddy Asihnyoto, SE, MAPS (Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan) 2. Rina Isnaeni, S.Sos, M.Sc (Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara) 3. Rizky Surya Triadi, SH, M.Si (Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan) 4. Aries Yanuar (Analisis Pengelola Keuangan pada Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN) 5. Nasrulloh, A.Md (Staf Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum dan Humas)

uf e uf



- Tugas
6. Titik Puspa Dewi, SE (Analisis Perumusan Pola Pencatatan dan Pelaporan pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
  7. Isa Al Anshori, A.Md.Ak (Penyusunan Bahan Pengelolaaan Keuangan pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
- : a. menyusun perencanaan anggaran Pemutakhiran PK-22;
- b. memberikan konsultasi dan solusi terhadap penggunaan anggaran Pemutakhiran PK-22;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran Pemutakhiran PK-22 di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- d. melaporkan penggunaan anggaran Pemutakhiran PK-22 secara berkala

## 2 Bidang Pengorganisasian Lapangan

- Ketua : Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan
- Wakil Ketua : Ketua DPP IPeKB
- Sekretaris : Ridwan Fadjri Nur, SE (Penata KKB Ahli Madya, Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
- Anggota :
1. dr. Mila Yusnita (Penata KKB Ahli Madya pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
  2. Anita Latifah, S.Si, M.H (DPP IPeKB)
  3. Adam Sugiharto, SE, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
  4. Susiin, S.Pd (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
  5. Sumiyati, SE (Perencana Ahli Muda pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
  6. Dwimartine Swesty Setyosusilandari, S.Pd (Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
  7. Ira Fitriyani Rachmat, S.Sos (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)

7 Wk 20,

- Tugas
8. Oliyanti Akmal, SKM (Analisis Pengendalian Penduduk pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
- : a. melakukan pemetaan lini lapangan pelaksana Pemutakhiran PK-22;
- b. melakukan penguatan dan koordinasi dengan IPeKB untuk pengorganisasian lapangan dan dukungan Penyuluh KB pada pelaksanaan Pemutakhiran PK-22;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pengorganisasian lapangan Pemutakhiran PK-22; dan
- d. melaporkan secara berkala pengorganisasian lapangan Pemutakhiran PK-22.

**3 Bidang Sosialisasi, Promosi, Advokasi dan Kemitraan**

- Ketua : Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum dan Humas
- Sekretaris : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
  2. Drs. Ade Anwar, M.Si (Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat)
  3. Ratna Juita Razak, SE (Pranata Humas Ahli Madya pada Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
  4. dr. Fabiola Tazrina Tazir, MAPS (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
  5. Ahmad Fuadi, SH (Perancang Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)
  6. Ulil Absor, S.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)
  7. M. Yusuf, SH (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana)
  8. Didik Trihantoro, S.Si, MAPS (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

7 up 2 r/

9. Ahmad Gesang Yuwono, SE, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
10. Fimela Apriany, SH, MAPS (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
11. Annisa Halimatussadiah, S.Sos, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
12. Tri Wulandari Henny Astuti, S.Sos, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat)
13. Andina Lestari, S.Ikom, M.M (Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat)
14. Duly Apika Sari, S.Sos, M.Ed (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga)
15. Riky Marizal, SE, M.Si (Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga)
16. Ira Fitriyani Rachmat, S.Sos (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
17. Vina Alistiana, S.Sos (Penata KKB Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
18. Rezha Pranatama, SE, MM, MSc (Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penduduk dan KB pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
19. Destriana Faried, SE, MMPd (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
20. An-Nisa Jasmine Putri F, S.Hum (Supporting Staff-Operator pada Pusat Pengendali Data Stunting)
21. Moch. Eko Saputro, A.Md.Kom (Layout Designer pada Pusat Pengendali Data Stunting)

yws & r/



Tugas	: a. menyusun perencanaan sosialisasi, promosi, advokasi dan kemitraan Pemutakhiran PK-22; b. melakukan sosialisasi dan promosi Pemutakhiran PK-22 kepada masyarakat melalui media; c. melakukan advokasi dan kemitraan Pemutakhiran PK-22 kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja; d. melakukan pemantauan dan evaluasi sosialisasi, promosi, advokasi dan kemitraan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22; dan e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sosialisasi, promosi, advokasi dan kemitraan Pemutakhiran PK-22
4 <b>Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>	
Ketua	: Mohamad Muchtar, SE, MM (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
Wakil Ketua	: Ristya Ira Murti, SE, MAPS (Penata KKB Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
Sekretaris	: Anistyas Haryanti, S.Si, M.Si (Statistisi Ahli Muda pada Pelaporan dan Statistik)
Anggota	: 1. Zulkipli Lubis, SE (Analisis Pengelola Keuangan APBN pada Direktorat Pelaporan dan Statistik) 2. Fauziah Ajeng Aryanti, SKM (Analisis KB pada Direktorat Pelaporan dan Statistik); 3. Tri Maryati, S.Pd (Penyusun Bahan Data KKB pada Direktorat Pelaporan dan Statistik); 4. Mudiyono, S.Kom, M.S.S.I (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data); 5. Septiana Irwanti, A.Md (Pranata Komputer Terampil pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)
Tugas	: a. menyiapkan pelaksanaan <i>workshop</i> Pemutakhiran PK-22;

uf Rym

- b. memastikan pelaksanaan *workshop* Pemutakhiran PK-22 berjalan dengan baik;
- c. menyusun laporan pelaksanaan *workshop* Pemutakhiran PK-22

5 **Bidang Penguatan Teknologi Informasi**

Ketua	: Direktur Teknologi Informasi dan Data
Wakil Ketua	: Rezky Murwanto, S.Kom, MPH (Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)
Sekretaris	: Baihaqi Nur, S.IP, M.Si (Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fajar Siddiq, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)</li><li>2. Yugo Waskito, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)</li><li>3. Mudiyono, S.Kom, M.S.S.I (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)</li><li>4. Hasyim Adnan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)</li><li>5. Indra Zumardi Putra, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data)</li><li>6. Iis Yuliani, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Pelaporan dan statistik)</li><li>7. Eko Prasetyo, S.Kom (Calon Pranata Komputer pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)</li></ol>
Tugas	: <ol style="list-style-type: none"><li>a. menyiapkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk pengumpulan, pengolahan, monitoring dan pemanfaatan data Pemutakhiran PK-22;</li><li>b. melakukan pemantauan dan evaluasi penguatan Teknologi Informasi Pemutakhiran PK-22;</li></ol>

W/S 27/11/

- c. menangani kendala aplikasi dan Teknologi Informasi selama Pemutakhiran PK-22; dan
- d. melaporkan secara berkala pelaksanaan penguatan Teknologi Informasi Pemutakhiran PK-22

**6 Bidang Manajemen Data Terpadu**

Ketua	: Direktur Pelaporan dan Statistik
Wakil Ketua	: Istiqomatul Fajrah Yulianti, S.Si, M.Stat (Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
Sekretaris	: Nindi Widyakirono, A.Md (Pengadministrasian Pengumpulan Data pada Direktorat Pelaporan dan Statistik)
Anggota	: 1. Diah Retno Minarni, S.Si, M.Si (Koordinator Pokja Integrasi Infomasi Geospasial Tematik Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan pada Badan Informasi Geospasial) 2. Husnul Wahyu Mahmudah, S.Si (Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana) 3. Anistyas Haryanti, S.Si, M.Si (Statistisi Ahli Muda pada Pelaporan dan Statistik) 4. Eko Prasetyo, S.Kom (Calon Pranata Komputer pada Direktorat Pelaporan dan Statistik) 5. Restu Adya Cahyani, SKM (Statistisi pada Pusat Pengedali Data <i>Stunting</i> ) 6. Siti Nur Eriza Faujiah, S.Stat (Statistisi pada Pusat Pengedali Data <i>Stunting</i> ) 7. Meindy Diani, S.Si ( <i>Supporting Staff-Operator</i> pada Pusat Pengedali Data <i>Stunting</i> ) 8. Arnur Oktafiyanti, SKM ( <i>Supporting Staff-Operator</i> pada Pusat Pengedali Data <i>Stunting</i> )
Tugas	: a. merancang mekanisme pengumpulan dan pengolahan data Pemutakhiran PK-22; b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Pemutakhiran PK-22; c. memberikan pendampingan teknis, konsultasi dan solusi terhadap kendala

Wg R Yr.



manajemen data Pemutakhiran PK-22 melalui *helpdesk*;

- d. memberikan umpan balik perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen data Pemutakhiran PK-22; dan
- f. melaporkan secara berkala proses manajemen data Pemutakhiran PK-22.

### III Tim Monitoring

Anggota

- :
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
  2. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
  3. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
  4. Kepala Biro Perencanaan
  5. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
  6. Inspektur Wilayah I
  7. Inspektur Wilayah II
  8. Inspektur Wilayah III
  9. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak
  10. Direktur Bina Ketahanan Remaja
  11. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
  12. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
  13. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
  14. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk
  15. Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan
  16. Direktur Analisis Dampak Kependudukan
  17. Direktur Bina Akses Pelayanan KB
  18. Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB
  19. Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus
  20. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi;
  21. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi

*W/S E. Y. R.*

Tugas

22. Direktur Advokasi dan Hubungan Antara Lembaga
  23. Direktur Pelaporan dan Statistik
  24. Direktur Teknologi Informasi dan Data
  25. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan
  26. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
  27. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB
- : a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 pada wilayah binaan;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 pada wilayah binaan; dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 pada wilayah binaan

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO